



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 25 Januari 2018

Halaman: 2

NABAN KENA OTT PUNGLI

Wawali: Citra Pemkot Ternoda

UMBULHARJO (MERAPI) - Citra Pemkot Yogyakarta tercoreng gara-gara oknum tenaga bantuan (naban) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terkena operasi tangkap tangan oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Polda DIY. Sanksi tegas bakal diberikan kepada oknum naban tersebut.

"Yang bersangkutan pasti akan diberi sanksi tegas karena menodai komitmen pelayanan bersih yang kita lakukan selama ini. Apalagi oknum itu sudah sembilan tahun jadi naban. Ini sudah mencoreng dan tidak ada ampun lagi," kata Wakil Walikota (Wawali) Yogyakarta Heroe Poerwadi di ruang kerjanya, Rabu (24/1).

Heroe menjelaskan, sanksi tegas berupa pemecatan terhadap oknum naban tersebut masih dikaji oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sanksi pemecatan atau pemberhentian akan melihat klausul dalam perjanjian kontrak kerja yang bersangkutan. Kasus tersebut juga menjadi peringatan serius dalam sistem birokrasi pelayanan di Pemkot Yogyakarta.

"Kalau di perjanjian melanggar langsung diputus kontraknya. Adanya kasus ini jadi *warning*. Perlu tindakan tegas. Ini harus jadi terakhir," tegasnya.

Menurutnya tindakan tegas perlu dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang. Pihaknya juga mengimbau Tim Saber Pungli Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kontrol pengawasan. Termasuk berkoordinasi dengan Inspektorat untuk mengawasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang punya potensi serupa kasus tersebut.

Ditegaskan selama sudah ada sistem operasi prosedur pelayanan perizinan ke masyarakat tidak dikenai pungutan di luar retribusi yang diatur. "Masyarakat atau pengusaha yang mau urus izin sebaiknya langsung mengurus sendiri. Jangan lewat orang lain. Kami tidak mengenal calo-caloan," tambah Heroe.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Hary Cahya mendesak, kepala daerah di Pemkot Yogyakarta memberikan sanksi tegas kepada oknum naban yang kena operasi tangkap tangan Polda DIY. Adanya kasus itu diakui Forpi yang bertugas memantau pakta integritas di Kota Yogyakarta, kecolongan. Untuk itu Forpi akan melakukan investigasi dugaan pungli tersebut terstruktur atau tidak.

"Dari sisi kasus OTT oknum naban itu sudah menjadi ranah hukum. Tapi ini menjadi pintu masuk dugaan pungli dilakukan sendiri atau terstruktur. Itu yang akan kita investigasi untuk memastikannya. Hasil investigasi akan kami laporkan ke waiikota untuk mewujudkan zona bebas korupsi di pemkot," tandas Hary.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. BKPP			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. BKPP			

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005